



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Jln. Gajah Mada Nomor 51 Telp. (0374) 646490 Kota Bima*

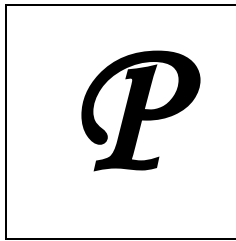
---

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**



**TAHUN 2018**

# KATA PENGANTAR



uji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2018 dapat dicapai secara maksimal.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2018 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima di masa mendatang.

**BIMA, FEBRUARI 2019**

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM .....	3
C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
D. ASPEK STRATEGIS .....	14
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	16
F. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN .....	19
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018.....	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	25
C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 .....	27
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	29
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	32
B. REALISASI ANGGARAN .....	59
C. CAPAIAN KINERJA ESELON III DAN IV.....	63
IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	104
B. SASARAN .....	105
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan setrategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan seta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasi guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolosi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme dan tata cara penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata carareviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018 ini disusun berdasarkan Rencana Setrategis tahun terakhir dari periode Renstra tahun 2014 – 2018.

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD didukung oleh 42 pegawai yang terdiri dari 30 Pegawai Negeri

---

Sipil dan 12 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut ;

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencanaberjumlah 42 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	30	71
2	CPNSD	-	0
3	Honorer	12	29
	Total	42	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan:

- a. Golongan:

Tabel 1.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS/Non PNS	CPNS
1	Golongan IV	6	-
2	Golongan III	18	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	-	-
5	Non Golongan	12	
	Total	42	-

- b. Jabatan Struktural :

Tabel 1.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	7
	Jumlah	12

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	0	0
2	S2	4	9,5
3	S1	21	50,0
4	D3	1	2,4
5	SMA/Sederajat	16	38,1
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	42	100

Disamping sumber daya manusia keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan Prasarana pendukung kantor antara lain terlihat pada tabel 8 pada Lampiran LAKIP ini

## B.MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM

### 1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP BPBD Kota Bima Tahun 2018 adalah Sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP BPBD Kota Bima Tahun 2018 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### 2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor .... tentang Revisi RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 386).

### C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah ( BPBD) sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga Teknis Daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah, membantu WaliKota Bima dalam:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian Bantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- f. Pemetaan kawasan Rawan Bencana;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat .

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai tugas :

#### 1. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio), mempunyai tugas :

- 1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam hal penanggulangan bencana;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a)Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b) Pemantauan
  - c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



## 2. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008). Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
- d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada staf;
- f. Memeriksa hasil kerja staf ;
- g. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencanayang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- h. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- j. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- p. Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

## 3. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing -masing Bidang dan Sekretariat;

- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Program.
- 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
    - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
    - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
    - e. Memeriksa hasil kerja staf ;
    - f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
    - h. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
    - i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
    - j. Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;
    - k. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
    - l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
    - m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
  - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
  - e. Memeriksa hasil kerja staf;
  - f. Menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
  - g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
  - h. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
  - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
  
3. Sub. Bagian Program mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan rencana hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
  - c. Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
  - e. Memeriksa hasil kerja staf ;
  - f. Mengadakan koordinasi dengan kepala Sub Bagian dan Bidang untuk kerhamonisan kerja;
  - g. Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana;
  - h. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
  - i. Menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
  - j. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan;
  - k. Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja staf ;
  - l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
  - m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan.

#### 4. BIDANG-BIDANG

##### 4.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- g. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi Kesiapsiagaan.

##### 1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana Kegiatan Seksi Pencegahan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;

- f. Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - g. Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - h. Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - i. Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
  - j. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
  - k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
  - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
  - e. Memeriksa hasil kerja staf ;
  - f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
  - h. Menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - i. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
  - k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - l. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
  - m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
  - n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

4.2 Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing masing Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- g. Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

ssxBidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

1. Seksi Tanggap Darurat;
2. Seksi Logistik

1. Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Tanggap Darurat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanggap Darurat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- g. Menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- h. Mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan pelaksanaan distribusi logistik;
- g. Melaksanakan pengaturan distribusi logistik;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

4.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil masing-masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam hal penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang

- penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
  - i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi;
  2. Seksi Rekonstruksi.
1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi ;
    - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
    - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
    - e. Memeriksa hasil kerja staf;
    - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
    - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
    - h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
    - i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
    - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.
  2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi;
    - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasilkegiatan Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai denganbidangnya masing-masing;
    - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
    - e. Memeriksa hasil kerja staf;



- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
  - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
  - h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;
  - i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
  - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### D. ASPEK STRATEGIS

Sebagai lembaga Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Good Governance* atau *Kepemerintahan yang baik*. Pengertian Kepemerintahan yang baik (*good governance*), dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- *Participation*; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law*; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparancy*; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive*; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.
- *Consensus Orientation*; *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- *Equity*; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

- *Effectiveness and efficiency*; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability*; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- *Strategic vision*; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam PROPENAS 2004-2009, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dihadapkan pada isu – isu strategis yang harus disikapi, isu strategis yang dimaksud antara lain :

- a. Secara Geografis Kota Bima memiliki berbagai potensi bencana yang beragam yang harus disikapi dengan berbagai program dan kegiatan yang focus pada penanggulangan baik pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana, Bencana tersebut antara lain : Banjir, Tanah Longsor Angin putting beliung, Angin kencang, Kebakaran, Gempa Bumi, dan Bencana Sosial;
- b. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih menitikan harapan besar hanya kepada pemerintah, padahal tanggung jawab penanggulangan bencana adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha;
- c. Besarnya biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengharuskan semua pihak untuk sadar dan lebih bijaksana untuk mengedepankan upaya – upaya mitigasi dan

kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko akibat bencana. Jika Anggaran program pengurangan risiko bencana diperbesar maka dapat menghemat hingga sampai 7 (Tujuh) kali lipat dibandingkan biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang paling muda di Kota Bima yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2010 Tanggal 28 Juli tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terdiri dari:

### 1. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah terdiri dari:

- 1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- 2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
- 3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
- 4) Unsur pengarah beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari atas:
  - a. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah, yaitu:
    1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
    3. Kepala BAPPEDA;
    4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
    5. Kepala Dinas Kesehatan.
  - b. 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di daerah.

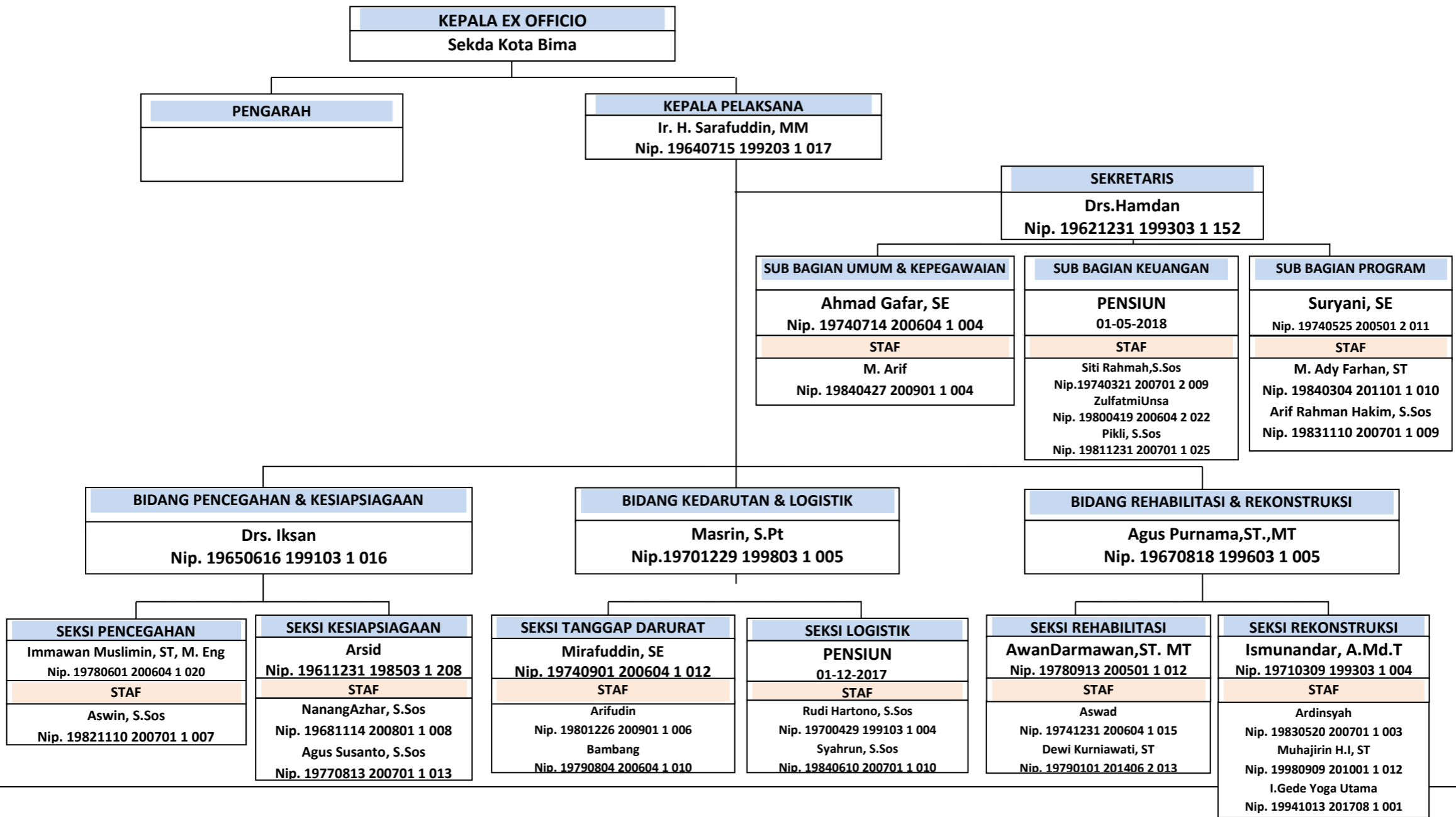
### 2. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2.2. Sub Bagian Keuangan
- 2.3. Sub Bagian Program dan pelaporan
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 3.1. Seksi Pencegahan
  - 3.2. Seksi Kesiapsiagaan
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 4.1. Seksi Tanggap Darurat
  - 4.2. Seksi logistik
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - 5.1. Seksi Rehabilitasi
  - 5.2. Seksi Rekonstruksi

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini :



**KEPALA EX OFFICIO**  
Sekda Kota Bima

**PENGARAH**

**KEPALA PELAKSANA**  
Ir. H. Sarafuddin, MM  
Nip. 19640715 199203 1 017

**SEKRETARIS**  
Drs.Hamdani  
Nip. 19621231 199303 1 152

**SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN**  
Ahmad Gafar, SE  
Nip. 19740714 200604 1 004  
STAF  
M. Arif  
Nip. 19840427 200901 1 004

**SUB BAGIAN KEUANGAN**  
PENSIUN  
01-05-2018  
STAF  
Siti Rahmah, S.Sos  
Nip. 19740321 200701 2 009  
Zulfatmi Unsa  
Nip. 19800419 200604 2 022  
Pikli, S.Sos  
Nip. 19811231 200701 1 025

**SUB BAGIAN PROGRAM**  
Suryani, SE  
Nip. 19740525 200501 2 011  
STAF  
M. Ady Farhan, ST  
Nip. 19840304 201101 1 010  
Arif Rahman Hakim, S.Sos  
Nip. 19831110 200701 1 009

**BIDANG Pencegahan & Kesiapsiagaan**  
Drs. Iksan  
Nip. 19650616 199103 1 016

**BIDANG Kedarutan & Logistik**  
Masrin, S.Pt  
Nip. 19701229 199803 1 005

**BIDANG Rehabilitasi & Rekonstruksi**  
Agus Purnama, ST., MT  
Nip. 19670818 199603 1 005

**SEKSI Pencegahan**  
Immawan Muslimin, ST, M. Eng  
Nip. 19780601 200604 1 020  
STAF  
Aswin, S.Sos  
Nip. 19821110 200701 1 007

**SEKSI Kesiapsiagaan**  
Arsid  
Nip. 19611231 198503 1 208  
STAF  
Nanang Azhar, S.Sos  
Nip. 19681114 200801 1 008  
Agus Susanto, S.Sos  
Nip. 19770813 200701 1 013

**SEKSI Tanggap Darurat**  
Mirafuddin, SE  
Nip. 19740901 200604 1 012  
STAF  
Arifudin  
Nip. 19801226 200901 1 006  
Bambang  
Nip. 19790804 200604 1 010

**SEKSI Logistik**  
PENSIUN  
01-12-2017  
STAF  
Rudi Hartono, S.Sos  
Nip. 19700429 199103 1 004  
Syahrin, S.Sos  
Nip. 19840610 200701 1 010

**SEKSI Rehabilitasi**  
Awan Darmawan, ST, MT  
Nip. 19780913 200501 1 012  
STAF  
Aswad  
Nip. 19741231 200604 1 015  
Dewi Kurniawati, ST  
Nip. 19790101 201406 2 013

**SEKSI Rekonstruksi**  
Ismunandar, A.Md.T  
Nip. 19710309 199303 1 004  
STAF  
Ardinsyah  
Nip. 19830520 200701 1 003  
Muhajirin H.I, ST  
Nip. 19980909 201001 1 012  
I. Gede Yoga Utama  
Nip. 19941013 201708 1 001

## F. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar Belakang, Isu Strategis dan Struktur Organisasi.
2. BAB II – Perencanaan Kinerja, memuat ringkasan / ikhtisar perjanjian kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018.
3. BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
4. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. STURUKTUR ORGANISASI BPBD
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
3. REALISASI KEUANGAN
4. REALISASI DANA TAK TERDUGA TAHUN 2018
5. MATRIKS RENSTRA BPBD
6. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BPBD

## **BAB II**

---

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategic local, nasional dan global.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan demikian tahun 2018 ini merupakan tahun ke V dari pelaksanaan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bima.

#### 1. Visi

Visi dan Misi merupakan penjabaran dari Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 dan Visi Walikota Tahun 2013 – 2018. Telah diterjemahkan dalam RPJMD Periode ke dua yaitu RPJMD Tahun 2013 – 2018 adalah “Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil Dan Sejahtera”. Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

***”TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT”.***

#### 2. Misi

Sejalan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima maka Misi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholders penanggulangan bencana dalam Pengurangan Resiko bencana;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat
3. Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.
4. Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
5. Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

#### 3. Tujuan

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ini adalah:

1. Meningkatkan ketangguhan Kota terhadap bencana
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana
3. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat
5. Terwujudnya pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana secara terpadu dan menyeluruh

Di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditempuh melalui strategi utama yaitu : Terwujudnya Ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana

#### 4. Kebijakan

Kebijakan yang dilembagakan meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta peningkatan peran serta masyarakat, dan dunia usaha melalui program – program Pengurangan Resiko bencana dan Kelurahan tangguh bencana
2. Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur dan tim Penanggulangan bencana melalui peningkatan pelatihan, Gladi/simulasi dan kompensasi
3. Mendorong terwujudnya koordinasi yang efektif dengan semua stakeholder dalam perencanaan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi pasca bencana.
4. Mendorong tersedianya data dan dokumen – dokumen kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam mendukung terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana
5. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
6. Melakukan upaya – upaya pemulihan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran rencana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Strategi pelayanan BPBD Kota Bima**

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
								2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya Kota Bima yang tangguh dan mandiri melalui penanganan bencana yang tanggap, cepat dan tepat	Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peranserta stakeholder penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana	Meningkatkan Ketangguhan Kota terhadap bencana	Kriteria Kota Tangguh	Pratama	Meningkatkan Peran aktif masyarakat dalam penanganan risiko bencana	Persentase Kelurahan Tangguh	%	15	39	53	66	100
	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam	Meningkatkan kapasitas aparatur dan	Persentase SDM terlatih	80 %	Meningkatnya kapasitas aparatur dan	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	150	180	180	180	180

	penanganan bencana secara cepat dan tepat	tim penanggulangan bencana			tim penanggulangan bencana								
	Meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana dengan instansi terkait	Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Persentase Keselarasan pedoman penanggulangan bencana	70 %	Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	Dokumen	3	2	1	1	1	
	Terwujudnya penanggulangan kedaruratan secara cepat, tepat, efektif terkoordinir dan terpadu	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan cepat	Persentase penanggulangan kedaruratan bencana	100 %	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana						%					80	85	
	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana	Terselenggaranya pemulihan sarana dan	Terselenggaranya pemulihan sarana dan	90 %	Terwujudnya pemulihan sarana dan	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	50	60	70	80	90	

	fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	prasarana fisik dan non fisik pasca bencana		prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencan							
	JUMLAH RATA - RATA												

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani Indikator Kinerja Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013 – 2018 serta dokumen Rencan Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2013 – 2018. Indikator Kinerja Utama ini ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Penjelasan Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Bima**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Meningkatnya Peran aktif Masyarakat dalam Penanganan Risiko Bencana	Porsentase Kelurahan Tangguh	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh}}{\text{Total jumlah kelurahan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih dan profesional	$\frac{\text{Jumlah SDM yang dilatih}}{\text{Target SDM yang terlatih pada tahun berkenaan}}$

3.	Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah dokumen PB yang dapat disusun</u></p> <p style="text-align: center;">Jumlah dokumen PB yang direncanakan pada tahun berkenaan</p>
4.	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Bencana	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Korban bencana yang dapat dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya x 100%</u></p> <p style="text-align: center;">Jumlah Korban Bencana</p>
	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang saat bencana yang tersedia x 100%</u></p> <p style="text-align: center;">Jumlah sarana dan prasarana penunjang yang harus ada saat bencana</p>	
5.	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana bisa ditangani	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Sarana Prasarana fisik yang dapat diperbaiki x 100%</u></p> <p style="text-align: center;">Jumlah Sarana Prasarana Fisik yang rusak pasca bencana</p>

### C. PERENCANAANKINERJA TAHUN 2018

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu yang tertuang dalam perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahun 2018

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.

Untuk merealisasikan sejumlah kegiatan tersebut tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur *input* yang harus dipenuhi dan mempunyai tolok ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

Pada prinsipnya Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama Tahun 2018. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan maupun di tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Perjanjian Kinerja / Penetapan kinerja BPBD Kota Bima Tahun 2018 adalah diuraikan dalam ikhtisar berikut :

**Tabel 2.3**

**Misi I : Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholders penanggulangan bencana dalam Pengurangan Risiko bencana;**

**Tujuan : Meningkatkan ketangghuhan kota terhadap bencana**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Porsentase Kelurahan Tangguh Bencana	100 %

**Tabel 2.4**

**Misi II :Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat**

**Tujuan : Meningkatkan kapasitas Aparatur dan tim Penanggulangan Bencana**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang Terlatih	180 Orang

**Tabel 2.5**

**Misi III : Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.**

**Tujuan : Terwujudnya Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia menjadi pedoman PB	1 Dok

**Tabel 2.6**

**Misi IV : Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif, terkoordinir dan /terpadu;**

**Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan tepat**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase penanganan kedaruratan bencana	100 %
	Porsentase ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang saat bencana	85 %

**Tabel 2.6**

**Misi V : Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.**

**Tujuan : Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Porsentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	100 %

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sedangkan Pemberi amanah adalah Walikota Bima.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

Tabel 2.7.  
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peran aktif masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Porsentase Kelurahan tangguh bencana	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM terlatih	180 Orang
3	Tersedianya Pedoman dalam Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia menjadi Pedoman PB	1 Dokumen
4	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara cepat dan tepat	Porsentase Pemenuhan Kebutuhan dasar saat bencana	100 %
		Porsentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang saat bencana	85 %
5	Terwujudnya Pemulihan Sarana Prasarana Fisik dan Non fisik Pasca bencana	Porsentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik dan Non fisik Pasca bencana	90 %

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	924.591.900,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	339.927.000,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	46.792.500,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	123.200.000,00
5.	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Rp.	42.385.000,00
6.	Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	Rp.	369.484.000,00
7.	Program Kesiapsiagaan	Rp.	669.222.200,00
8.	Program Rehabilitasi	Rp.	89.910.000,00
9.	Program Rekonstruksi	Rp.	51.807.011.160,00
10.	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana	Rp.	828.489.700,00
11.	Program Peringatan Dini	Rp.	524.524.700,00
12.	Program Peningkatan Pengelolaan Pergudangan dan Logistik	Rp.	170.540.000,00
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Rp.	8.000.000,00
14.	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat	Rp.	82.035.000,00
15.	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Rp.	177.490.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>56.203.648.160,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 ini didasarkan kepada keluaran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018.

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang dianalisa dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra BPBD Kota Bima. Disamping itu juga di analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018, Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018 adalah : Terwujudnya Ketangguhan Kota dalam Penanggulang Bencana. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana dengan indikator tujuan adalah kriteria kota tangguh menuju kota pratama. Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60).
2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50).
3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35).

Tingkat ketangguhan Kota Bima dalam menghadapi bencana berada dilevel Pratama (skor 20-35). Untuk mencapai tingkat ketangguhan kota ke level yang lebih tangguh butuh kerja keras dari BPBD Kota Bima untuk mencapai tingkat ketangguhan yang lebih tinggi. sampai dengan tahun 2018 BPBD belum sepenuhnya mencapai level Pratama, karena belum semua keluarahan mendapat alokasi kegiatan bagi pembentukan kelurahan tangguh Pratama, capaiannya hanya sebesar 80% Pratama. Sedangkan tujuan lain yang ingin dicapai adalah meningkatkan kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang terlatih, karena dengan SDM yang terlatih

kinerja dari SKPD terkait bisa tercapai hingga 100 %. Sedangkan tujuan yang lain untuk menuju ketangguhan kota adalah terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh, dengan angka ketercapaian 100%. Tercapainya tujuan tersebut akan membentuk keselarasan pedoman penanggulangan bencana dengan semua pihak (swasta, pemerintah dan masyarakat) sehingga penanggulangan bencana dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan terarah. Tujuan lain dari ketangguhan sebuah kota dapat dicapai dengan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan cepat, terbukti dengan prosentase ketercapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana sebesar 100%. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana. Sedangkan tujuan dari ketangguhan sebuah kota yang terakhir adalah terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana. Indikasi dari ketangguhan sebuah kota adalah mampu untuk keluar dari keterpurukan dan kerusakan untuk kembali pulih membangun kembali sarana dan prasarana fisik dan non fisik untuk kebutuhan masyarakat. Pemulihan sarana pasca bencana banjir bandang tahun 2016, sampai dengan tahun 2018 hanya dapat tercapai sebesar 7,96 % atau sebesar 8,85 % angka capaian yang sangat kecil ini sangat dipengaruhi oleh kendala teknis maupun non teknis di Lapangan, diantaranya kendala pengadaan tanah dan banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan relokasi bagi korban bencana yang tidak mau pindah dari tempat semula di sempadan sungai meskipun telah dilakukan sosialisasi yang intens dengan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kota Bima dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1  
Tujuan dari BPBD Kota Bima

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan Ketangguhan Kota terhadap bencana	Kriteria Kota Tangguh	Pratama	-	80 % Pratama
Meningkatkan kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Persentase SDM terlatih	80 %	80%	100%

Mewujudkan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Persentase Keselarasan pedoman penanggulangan bencana	70 %	70%	100%
Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan cepat	Persentase penanggulangan kedaruratan bencana	100 %	100%	100%
Mewujudkan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	90 %	7,96	8,85

Untuk mencapai ketangguhan Kota dalam hal penanggulangan bencana terdapat 5 (Lima) indikator utama yang perlu direalisasikan sesuai dengan indikator kinerja Utama yang tertuang dalam IKU pada penetapan kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah dapat diuraikan secara detail pada analisa pencapaian masing – masing sasaran berikut :

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1): Persentase Kelurahan Tangguh Bencana

Secara Geografis Wilayah Kota Bima memiliki potensi bencana yang cukup banyak antara lain, Gempa Bumi, Angin puting beliung, Banjir, tanah longsor, Kebakaran, kekeringan, abrasi pantai dan bencana sosial. Wilayah Kota Bima yang dilewati oleh 7 sungai besar menyebabkan terjadinya luapan banjir yang setiap tahun terjadi, hal ini diperburuk lagi dengan adanya sistem drainase yang kurang bagus termasuk juga terjadinya alih fungsi daerah resapan menjadikan hampir seluruh kelurahan di wilayah kota Bima mendapat ancaman banjir terutama daerah hilir seperti Kelurahan Paruga, Sarae, Tanjung, Nae, Penaraga, Penatoi, jatiwangi dll.

Ketangguhan dapat diartikan sebagai kesiapan masyarakat untuk menghadapi segala risiko yang terjadi akibat bencana, sehingga dapat memiliki daya lenting untuk kembali bangkit dan mendapat akses baik akses ekonomi, sosial, fisik maupun lingkungan sehingga Upaya membangun ketangguhan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat,

Menyadari hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bima menetapkan Target Kinerja kelurahan tangguh sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Kelurahan untuk membentuk Kelurahan tangguh tingkat pratama.

Sampai dengan tahun 2018, Sasaran Strategis 1 (S1) Persentase kelurahan tangguh bencana yang dibentuk sebesar 86,84 % dari 38 kelurahan yang akan dibentuk, dimana pada tahun 2018 persentase terbentuk kelurahan tangguh sebesar 86,84 % atau 33 Kelurahan dari 38 kelurahan yang akan dituntaskan sampai tahun 2018, pada tahun ini kelurahan yang dibentuk sebanyak 5 Kelurahan yaitu 5 kelurahan dari Dana APBD II Kota Bima sedangkan Dana APBD I Provinsi dan dana APBN/BNPB tahun ini sebanyak 0 (tidak ada). Tabel ketercapaian Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2  
Realisasi Target Kinerja Sasaran Strategis 1 (S1) : Persentase Kelurahan tangguh bencana

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Capaian	Realisasi				Total
						2018	APBD II	APB D I	BNPB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Kelurahan Tangguh bencana	1	<b>Program Kesiapsiagaan</b>		100	86,84	86,84	-	-	86,84
		1	Pembentukan Kelurahan Tangguh	100						

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada target kinerja sasaran Strategis 1 (S1) adalah sebesar 86,84 %, pencapaian sasaran strategis ini diperoleh melalui kegiatan Pembentukan Kelurahan tangguh pada program kesiapsiagaan. 5 Kelurahan dapat direalisasikan melalui anggaran APBD II pada DPA BPBD Kota Bima, melalui APBD I dan BNPB Pusat tidak ada. Realisasi kelurahan tangguh yang di bentuk tahun 2018 sebanyak 5 Kelurahan sehingga total jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 33 Kelurahan.

Tabel. 3.3  
Perbandingan Jumlah Kelurahan Tangguh Tahun 2016 s/d 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN (%)			Target Sasaran			Ketercapaian (%)		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=4/7*100$	$11=5/8*100$	$12=6/9*100$
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Persentase Kelurahan tangguh bencana	100	103,64	86,84	53	66	100	100	103,64	86,84

Tabel. 3.4  
Capaian Renstra pada Sasaran Strategis 1 (S1)

Sasaran Strategis 1 (S1)	Target/ tahun					Total Kelurahan	Realisasi (%)						Total Capaian sd thn 2016	%
	2014	2015	2016	2017	2018		2015	%	2016	%	2017	%		
Jumlah Kelurahan tangguh Bencana	6	15	20	25	38	38	39,47	100	52,63	100	68,4	103,64	26	68,4

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sasaran strategis 1 (S1) pada tahun 2016 dapat terealisasi sebesar 100 % atau terbentuk 5 kelurahan dari target kelurahan yang dibentuk 5 kelurahan sehingga total kelurahan yang dibentuk samai dengan tahun 2016 sebanyak 20 kelurahan. Pada tahun 2017 ini dapat terealisasi sebesar 103,64 % atau terbentuk sebanyak 25 Kelurahan. Pada Tahun ini kelurahan yang dibentuk melampaui dari target yang direncanakan hal ini disebabkan ada penambahan dukungan anggaran dari BPBD Propinsi sebanyak 1 Kelurahan dan dukungan dari BNPB sebanyak 2 kelurahan yang dibentuk melalui Dana APBN melalui Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh pada Kedeputusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga total kelurahan yang dibentuk sebanyak 28 kelurahan yang melampaui target 25 kelurahan sehingga realisasinya dari 100 % menjadi 103,64 %. Pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 86,84 % atau terbentuk 5 Kelurahan dari target 100 % atau 13 kelurahan yang dibentuk. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kota Bima serta

tidak adanya dukungan dari BPBD Propinsi dan Dukungan dari BNPB. Sehingga Realisasi kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2018 sebesar 86,84 % atau terbentuk 33 kelurahan.

Dalam proses pembentukan Kelurahan Tangguh di masyarakat, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1, Melakukan PCVA (Partisipatory capasitas and vulnerability Apraisal) untuk mendapatkan informasi awal tentang kapasitas, kerentanan yang ada di kelurahan
3. Mengkaji Lebih mendalam tentang Kapasitas dan kerentanan terhadap ancaman yang ada di kelurahan
4. Bersama masyarakat menyusun SOP dan Rencana Aksi masyarakat
5. Membentuk Relawan penanggulangan bencana

Output yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut adalah terdiri dari :

- a. Tersusunnya Dokumen Analisa Risiko bencana
- b. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Masyarakat
- c. Penetapan Jalur Evakuasi di Kelurahan/SOP Peringatan Dini Bencana
- d. Adanya SK Relawan Kelurahan (TSBK)

Tujuannya adalah masyarakat dapat mengenali potensi ancaman yang ada di masyarakat, menganalisa kerentanan yang dimiliki dan kapasitas sebagai sumber daya yang mendukung daya lenting kembali jika terjadi bencana. Sehingga masyarakat secara mandiri melakukan upaya awal untuk penyelamatan diri dan keluarga sebelum pihak lain datang membantu. Berikut disajikan Daftar Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2018.

Tabel.3.5  
Daftar Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2018

No	Nama Kelurahan/ tahun pembentukan	Tingkat ketangguhan	Sumber Dana Pembentukan	Ket
<b>I</b>	<b>2014</b>			
1	Kel Jatiwangi	Pratama	Donor/OXFAM	Jumlah Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai tahun 2018 pada tingkat pratama sebanyak 33 Kelurahan, 6 Kel bersumber dari Donor/OXFAM, 15 Kel bersumber dari APBD II/Kota Bima dan 3 Kel dari Dana APBD I/Provinsi dan 2 Kelurahan dari Dana
2	Kel Kendo	Pratama	Donor/OXFAM	
3	Kel Kolo	Pratama	Donor/OXFAM	
4	Kel Ntobo	Pratama	Donor/OXFAM	
5	Kel Nungga	Pratama	Donor/OXFAM	
6	Kel Tanjung	Pratama	Donor/OXFAM	
<b>II</b>	<b>2015</b>			
1	Kel Lampe	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Melayu	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel NaE	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel PenanaE	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Jatibaru	Pratama	APBD II/Kota	
6	Dodu	Pratama	APBD I/Provinsi	



7	Manggemaci	Pratama	APBD I/Provinsi	APBN/BNPB, sedangkan pembentukan Kelurahan pada tingkat pengembangan pada tingkat Madya adalah 2 Kelurahan yang bersumber dari Dana APBN/BNPB
8	SaraE	Pratama	APBN/BNPB	
9	Paruga	Pratama	APBN/BNPB	
III	<b>2016</b>			
1	Kel Lewirato	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Penatoi	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel Pane	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel Penaraga	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Dara	Pratama	APBD II/Kota	
IV	<b>2017</b>			
1	Kel Lelamase	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Santi	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel Mande	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel Sadia	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Monggonao	Pratama	APBD II/Kota	
6	Kel Matakando	Pratama	APBD I/Provinsi	
7	Kel SaraE	Madya	APBN/BNPB	
8	Kel Paruga	Madya	APBN/BNPB	
V	<b>2018</b>			
1	Sambinae	Pratama	APBD II/Kota	
2	Rite	Pratama	APBD II/Kota	
3	Rontu	Pratama	APBD II/Kota	
4	Rabadompu Barat	Pratama	APBD II/Kota	
5	Rabadompu Timur	Pratama	APBD II/Kota	

Selama tahun 2018, dalam pelaksanaan pembentukan Kelurahan tangguh bencana terdapat Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu, terbatasnya SDM di BPBD terutama tenaga fasilitator pembentukan kelurahan tangguh, namun antisipasi yang dilakukan adalah mengundang Forum PRB Mbojo Matenggo untuk menjadi tenaga fasilitator untuk menambah fasilitator yang tersedia di BPBD. selain itu, bagi Kelurahan tangguh yang telah terbentuk sebelumnya menjadi sedikit fakum dalam melaksanakan program kerjanya oleh Relawan/ TSBK karena selain kurangnya pembinaan yang kontinyu dari BPBD juga terdapat beberapa kelurahan yang fakum karena adanya beberapa relawan yang kurang konsisten terhadap tugas kerelawanannya sehingga dapat mengganggu semangat bagi rekannya yang lain.

Selama tahun 2018 BPBD Kota Bima tidak melakukan kerja sama dengan OXFAM untuk melakukan pendampingan bagi TSBK untuk dapat mengembangkan usaha ekonomi makro sebagai salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim. seperti adanya Kelompok Bank sampah SaraE, Kelompok Ekonomi Makro lainnya seperti Penanaman Pohon buah dan tanaman keras melalui kegiatan HKM dan Penghijauan di kelurahan Nungga dan Lelamase Kerja sama dengan Forum PRB, BPBD dan OXFAM. Hal ini disebabkan karena OXFAM menganggap BPBD Kota Bima dan Pemerintah setempat sudah mampu memberikan dukungan anggaran dan melakukan pendampingan terhadap TSBK yang dibentuk sehingga dukungan anggaran dari OXFAM tidak ada. Dengan demikian BPBD sebagai leading sector

penanggulangan bencana agar dapat melakukan koordinasi dengan SKPD lain agar dapat mengkoordinasikan kegiatan TSBK dengan SKPD lain seperti Dinas Koperindag, Dinas Lingkungan Hidup dll, sehingga Forum PRB dan TSBK akan terus eksis dalam melakukan gerakan - gerakan kemanusiaan di Bidang penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Kegiatan pembentukan kelurahan tangguh dapat terlaksana karena adanya dukungan yang cukup besar dari berbagai pihak, seperti Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat sebagai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukannya, Dukungan BNPB dan BPBD Provinsi NTB juga memberikan kontribusi untuk mempercepat tercapainya target RPJMD untuk menuntaskan Kelurahan tangguh pratama sampai dengan tahun 2018 sebesar 100 % atau sebanyak 38 kelurahan.

Pembentukan Kelurahan tangguh ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana baik kapasitas pemerintah maupun Kapasitas masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kapasitas Daerah yang dilakukan bersama dengan BNPB dengan menggunakan metode scor card bahwa Kota Bima mendapat peningkatan nilai yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Kota Bima mendapat nilai 3 dalam penilaian pada 5 level penilaian ketangguhan Kota. sementara tahun 2017 mendapat nilai 4 dalam 5 level penilaian atau berada pada ***Tingkat kapasitas tinggi*** dengan indeks kapasitas 0,85. Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga Kab Bima hanya berada pada level 2 untuk kapasitas daerahnya atau masih kategori rendah.

Ketangguhan masyarakat di tingkat kelurahan menjadi salah satu indikator penting memberikan kontribusi terhadap terbentuknya ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana. Dukungan Pemerintah pusat melalui Program dan kegiatan BNPB cukup memberi kontribusi menambah ketangguhan Kota Bima, seperti adanya kegiatan Mitigasi Partisipatif untuk pembangunan rumah aman bencana dari Kedepujian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.

Pada bulan Desember tahun 2016, Ketangguhan Kota Bima diuji dengan terjadinya Banjir bandang yang sangat besar sepanjang sejarah, kejadian bencana banjir bandang pada tanggal 21 dan 23 desember yang melanda sebagian besar wilayah Kota Bima menyebabkan 105.621 Orang terdampak dan kerugian aset fisik sarana prasarana infrastruktur 2,1 Triliun rusak, namun dengan adanya ketangguhan Kota yang telah terbentuk maka bencana besar tersebut tidak terdapat korban jiwa, dan hanya dalam jangka waktu yang kurang dari 2 bulan masyarakat dapat segera pulih dari keterpurukan. Pada awal tahun 2017 yang lalu masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa bahkan fasilitas umum yang rusak seperti Drainase, Jalan, Sungai telah diperbaiki hingga mencapai 90 % melalui program - program pemulihan darurat dari BNPB maupun program Nasional melalui Program KOTAKU yang telah dikoordinasikan oleh BPBD maupun oleh lintas sektor lainnya.

Untuk mendukung ketangguhan Kota ini juga OXFAM melalui Mitra Lokalnya LP2DER melakukan program - program peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan, workshop serta studibandung pada Negara - Negara yang sudah maju dalam hal penanggulangan bencana

Untuk mendukung program Kota Tangguh yang dicanangkan BPBD Kota Bima, tentunya banyak upaya yang dilakukan baik pra bencana, saat bencana /tanggap darurat maupun pasca bencana, sehingga selain Program Kelurahan Tangguh, Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaiannya dalam melakukan pelayanan bantuan kepada masyarakat korban bencana adalah melakukan upaya tanggap darurat. Upaya tersebut berupa pemberian bantuan uang tunai, logistik maupun bantuan perbaikan darurat terhadap sarana fisik maupun non fisik sesuai jenis kerusakan atau kerugian yang diderita korban bencana. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Pemenuhan sandang pangan, Pemenuhan Air bersih dan sanitasi yang tersedia dalam DPA BPBD Kota Bima dan Anggaran Dana tak terduga yang ada pada DPKAD. serta bantuan darurat melalui dana siap pakai dari BNPB. Program lain yang mendukung program Kota tangguh bencana juga adalah program Penyuluhan penanggulangan bencana berupa kegiatan diklat kepada masyarakat, diklat kepada SKPD terkait dan diklat kepada Tim Penanggulangan bencana dan Peningkatan kapasitas kelembagaan. Program kesiapsiagaan kegiatan Gladi mekanisme tanggap darurat bencana yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun untuk menguji kesiapan relawan dan tim penanggulangan bencana lainnya dalam menghadapi bencana.

## 2. Sasaran Strategis 2(S2): Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana.

### 2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2(S2): Jumlah Sumber Daya Manusiaterlatih

Sumber daya manusia yang trampil merupakan salah satu unsur manajemen organisasi yang paling penting dalam menggerakkan sebuah roda organisasi, jika Sumber daya manusia tidak trampil dalam menjalankan tugas maka penggunaan sumber daya organisasi lainnya seperti Dana Organisasi tidak dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sangat menyadari hal tersebut maka pada strategis 2 (S2) menargetkan 180 Orang yang terlatih dalam hal penanggulangan bencana. Untuk mencapai target (S2) ini, upaya yang dilakukan adalah memberikan Diklat dan penyuluhan baik kepada aparatur Pemerintah maupun kepada Tim Penanggulangan Bencana Lainnya melalui Program penyuluhan dan penanggulangan bencana, dan Program Kesiapsiagaan

Program penyuluhan dan penanggulangan bencana ini meliputi Kegiatan :

1. Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait,
2. Diklat Kepada Anggota Masyarakat (Tatap muka, brosur, leaflet)
3. Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, TAGANA, TIM SAR, dll)

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kesiapsiagaan melalui Kegiatan :

5. Gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018. Pencapaian sasaran Strategi 2 ini direalisasikan melalui 5 (Empat) kegiatan tersebut diatas Dari Target kinerja sebesar 180 Orang terlatih. Realiasi kinerja S2 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.6  
REALISASI KINERJA STRATEGIS 2 (S2)

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Capaian	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Tersedianya SDM Terlatih dan Profesional	<b>1</b>	<b>Program penyuluhan dan penanggulangan bencana ini meliputi Penanggulangan Bencana</b>		180	518	287,78	
		1	Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait	40				0
		2	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota Masyarakat	360				360
		3	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, TAGANA, TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	70				0
		4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	133				133
		<b>2</b>	<b>Program Kesiapsiagaan</b>					
		5	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana	30				25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program penyuluhan dan penanggulangan bencana serta Program kesiapsiagaan masing – masing dapat menyelesaikan target sebesar 100 % dan ada pula yang tidak dapat merealisasikan kegiatan, pada kegiatan Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait dapat terealisasi sebanyak 0 Orang dari target 40 orang untuk melatih SKPD terkait untuk perhitungan Kerugian dan Kerusakan pasca bencana dan kemudian ditindak lanjuti menjadi Tim Penyusun Dokumen JITU Pasma jika

terjadi bencana. Adapun penyebab dari tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya emotongan anggaran untuk kegiatan tersebut yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan. Kegiatan Diklat penyuluhan kepada masyarakat outputnya adalah 360 orang tenaga kependidikan untuk menjadi motivator dalam melaksanakan Sekolah aman bencana. Sehingga target yang dicapai sebesar 100 %. Diklat dan penyuluhan kepada Tim PB dapat melatih Tim Relawan sebanyak 0 Orang dari target sebanyak 70 orang untuk mendukung kegiatan Kota tangguh dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ini menyangkut peningkatan Kapasitas bagi Anggota Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, TSBK dan Federasi TSBK dan Tim Teknis SKPD dan Tim Koordinasi SKPD, sehingga total Tim yang dikapasitasi sebanyak 133 Orang dari target sebanyak 133 orang Sehingga target yang dicapai sebesar 100 %. Selain dari itu terbentuk relawan dari kegiatan gladi tentang mekanisme tanggap darurat sebanyak 25 orang dari target 30 orang. Sehingga total SDM yang dapat terlatih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 518 Orang atau sebesar 287,78 %, pencapaian ini melebihi dari target renstra sebesar 100 % atau sebanyak 180 orang.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata – rata realisasi lebih dari 100 % atau melampaui target. Dimana pada tahun 2015 target SDM terlatih yang dibentuk sebanyak 180 orang sedangkan realisasinya sebanyak 204 orang atau 113,33 %. Hal ini menunjukkan kinerja dari BPBD dalam membentuk relawan sangat baik. Begitu pula pada Tahun 2016 SDM terlatih yang dibentuk mengalami kenaikan yang signifikan dimana target yang dicapai 180 orang sedangkan realisasinya sebanyak 692 orang atau 384,44 % hal ini disebabkan besarnya antusias dari masyarakat untuk menjadi relawan penanggulangan bencana serta dukungan anggaran yang besar. Pada Tahun 2017 SDM yang terlatih melampaui target yang ditetapkan, walaupun secara jumlah SDM terlatih yang dibentuk mengalami penurunan dari tahun 2016 dimana pada Tahun 2017 SDM yang terlatih yang dibentuk sebanyak 335 orang. Walaupun SDM yang dibentuk lebih rendah dari tahun sebelumnya tetapi target dari SDM yang dibentuk telah tercapai yaitu melebihi dari target sebanyak 180 orang. Pada Tahun 2018 SDM yang dibentuk mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari SDM yang dibentuk sebanyak 518 orang. Sehingga rata – rata SDM yang dibentuk melampaui target yang ditetapkan. perbandingan jumlah SDM terlatih tahun 2015 s/d tahun 2018 tersaji secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel. 3.7  
Perbandingan jumlah SDM terlatih Tahun 2015 s/d Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				Target Sasaran (%)				Capaian (%)			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4/8*100	13=5/9*100	14=6/10*100	15=7/11*100
	Tersedianya SDM Terlatih dan Profesional	Jumlah SDM yang terlatih dan profesional	204	692	335	518	180	180	180	180	113,33	384,44	186,11	287,78

## 2.2. Hambatan dalam pelaksanaan

Pencapaian pada sasaran strategis 2 (S2) ini sangat tergantung pada ketersediaan dukungan dana baik APBD maupun dari luar dan juga ketersediaan SDMnya., Keberadaan tenaga terampil bersertifikat keahlian sangat terbatas, sehingga menjadi kendala juga dalam melakukan upaya upaya kedaruratan bencana. sehingga hal ini menjadi Salah satu rekomendasi dalam penilaian kapasitas daerah, sehingga untuk mendukung ketercapaian ini ke depan perlu adanya diklat - diklat bersertifikat keahlian untuk mendukung terlaksananya upaya - upaya dalam penanggulangan bencana. seperti bidang Penataan Gudang dan Logistik, Bidang Data dan Pusalops, dan sebagainya.

## 3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3): Jumlah dokumen penanggulangan bencana tersedia.

Dokumen Penanggulangan Bencana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, dokumen tersebut berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontigensi, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan aturan – aturan pendukung lainnya. Pada target sasaran strategis 3 (S3) untuk jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia pada tahun 2018 sebanyak 1 Dokumen yaitu Peraturan Walikota Bima Tentang Rencana Kontigensi Banjir Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target capaian 1 dokumen tersusun maka Pencapaian sasaran pada target sasaran strategis 3 (S3) adalah 100 % yang didukung melalui Program Penataan Peraturan Perundang – undangan pada kegiatan Penyusunan dan penerbitan produk hukum Daerah dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Secara rinci dapat dilihat pada tabel .

Tabel. 3.8  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3 (S3) : Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Capaian	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah dokumen PB yang tersedia	1 <b>Program penataan paraturan perundang-undangan</b>					
		1 Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	1	1	1	1	100.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target kinerja sasaran strategis 3 (S3) tahun 2018 adalah sebanyak 1 dokumen penanggulangan bencana yang kemudian terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu Peraturan Walikota Bima Tentang Rencana Kontingensi Banjir Tahun 2019 atau tercapai 100%

Tabel. 3.9  
Perbandingan Jumlah Dokumen Tahun 2014 s/d 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian					Target Sasaran (%)					Capaian (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13=4/8*100	14=5/9*100	13=6/10*100	14=7/11*100	15=8/12*100
	Tersedianya Pedoman dalam PB yang terencana	Jumlah Dokumen PB yang tersedia	3 (100%)	3 (150%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	3	2	1	1	1	37,5%	75%	87,5%	100%	112,5%

Dari uraian tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa realisasi pencapaian target kinerja sasaran (S3) pada tahun-tahun sebelumnya, selalu tercapai bahkan tren yang semakin meningkat, dari tahun 2014 s/d tahun 2018 target kinerja S3 ini dapat terealisasi 100% (Seratus Persen) dari target yang ditetapkan dokumen. Pada Tahun 2014 Dokumen yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen dari target dokumen sebanyak 3 dokumen, artinya capaian kinerja sasaran strategis 3 ini mencapai 100%. Pada Tahun 2015 dokumen yang dicapai sebanyak 3 dokumen artinya melebihi dari target sebanyak 2 dokumen. Artinya dari tahun

sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2016 dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen, ini artinya tercaai 100 %. Pada Tahun 2017 Dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen dari target dokumen sebanyak 1 dokumen. Pada Tahun 2018 dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen dari target dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen. Ini artinya capaian kinerja sasaran starteis 3 mencapai 100 %. Sehingga total keseluruhan dokumen yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 9 dokumen melebihi dari target Renstra sebanyak 8 dokumen atau 112,5 %.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dokumen ini adalah kurangnya SDM yang tersedia, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara BPBD Kota Bima membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen yang berasal dari Dinas terkait dan menggandeng Forum PRB Mbojo Ma tenggo yang memiliki SDM yang cukup sebagai mitra kerja BPBD dalam upaya pengurangan Risiko Bencana. Upaya tersebut cukup efektif menyelesaikan tugas – tugas teknis, yang kemudian hasil yang dicapai pada tingkat teknis dikoordinasikan kembali pada tingkat lebih tinggi yaitu melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi SKPD yang juga dibentuk untuk mempermudah koordinasi lintas SKPD terkait.

**4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 (S4):** terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat.

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. sedangkan tujuan dari fase tanggap darurat adalah :

1. Membatasi korban dan kerusakan
2. Mengurangi penderitaan
3. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat
4. Mitigasi kerusakan dan kerugian
5. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi

Tahapan penanggulangan bencana pada fase darurat adalah penanganan kedaruratan bencana atau penanganan saat bencana. pada tahapan ini semua/ seluruh kemampuan sumber daya harus disiapkan untuk memaksimalkan penanganannya baik Sumber Dana, Peralatan maupun Sumber daya manusianya. baik sumber daya dalam daaerah maupun sumber daya dari Luar untuk mendukung terlaksananya upaya pemulihan secara cepat.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2010, Keadaan darurat dapat digolongkan menjadi 3 fase yaitu, masa siaga darurat (1), masa tanggap darurat (2) maupun masa tanggap darurat menuju ke pemulihan (3). Pada keadaan darurat bencana, Pemerintah dalam hal ini Walikota Bima akan



mengeluarkan Pernyataan bencana berdasarkan Hasil Kajian Tim Reaksi cepat dan rekomendasi Lembaga terkait seperti BMKG. maka sejak pernyataan bencana diterbitkan maka sejak itulah segala kemampuan dikerahkan untuk membantu menanggulangi secara cepat dan tepat.

Pencapaian sasaran strategis 4 ini dapat dicapai melalui 2 (Dua) indikator sasaran strategis yaitu:

1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana (S4.1)
2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana (S4.2)

#### 4.1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana (S4.1)

Kegiatan pada fase tanggap darurat meliputi tahapan assesment/pendataan korban, Koordinasi penanggulangan bencana, Rencana operasi, Evakuasi Korban, pendistribusian bantuan dan evaluasi dan pelaporan. Setelah melakukan upaya evakuasi korban ke tempat evakuasi yang aman terhadap bencana, maka langkah berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan efektifitas penanganan bencana. Selama tahun 2018 Badan penanggulangan bencana telah menangani kejadian bencana sebanyak 26 Kasus kejadian bencana. Semua kejadian bencana tersebut dapat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya pada masa tanggap darurat terjadi. Meskipun disana sini masih terdapat kekurangan namun secara keseluruhan dan secara bertahap dapat terlayani dengan baik kebutuhan dasar masyarakat korban seperti sembako, air bersih, penerangan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya termasuk pemulihan darurat sarana dan prasarana fisik. Sehingga target capaian untuk S4.1 ini dapat terealisasi sebesar 100 % dari target 100 %.

Tabel. 3.10

berikut dapat menggambarkan capaian sasaran S4.1

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Satuan	% Realisasi	Capaian		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Bencana	1 Penanganan kedaruratan bencana			%		100	%	100	100	
		Jumlah Kejadian bencana		26	Kejadian	100					
		Jumlah Kejadian bencana yang bisa ditangani	100	100	%						
		Program pemenuhan kebutuhan dasar									
		1 Pemenuhan Kebutuhan air bersih dan sanitasi	39	39	Titik	100					
		2 Pemenuhan sandang dan pangan	3	3	Jenis	100					
		Program pengkajian secara cepat dan tepat									
		1 Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	1	1	Dok	100					

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis 4.1. ini dapat terealisasi 100 %, capaian ini dapat diperoleh melalui capaian Program Pemenuhan kebutuhan dasar pada kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dan kegiatan Pemenuhan sandang dan pangan, masing - masing terealisasi 100 %, Kegiatan pemenuhan air bersih dan sanitasi ini dapat terpenuhi melalui dana APBD II dan dana APBD I Provinsi. kegiatan ini outputnya adalah pendropingan air pada daerah yang memiliki krisis air bersih yang merupakan bencana turunan dari banjir bandang akibat rusaknya jaringan perpipaan air minum sehingga harus dilakukan pendropingan air bersih sejak banjir bandang Desember 2016 terjadi hingga saat ini, di 39 titik di 9 kelurahan. begitu juga dengan kegiatan pemenuhan sandang dan pangan, kegiatan ini dilakukan melalui dana APBD pada DPA BPBD tahun 2018. Bantuan sandang pangan dapat berupa Beras, makanan siap saji pakaian, selimut dll. Data Jumlah dan jenis sandang dan pangan yang masuk maupun yang didistribusikan kepada masyarakat tersaji pada Lampiran Lakip ini.

Program pengkajian secara cepat dapat terealisasi 100 % melalui kegiatan Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban, output kegiatan ini adalah berupa data dan informasi tentang jumlah dan cakupan lokasi korban bencana sebagai dasar kebijakan dalam penetapan status tanggap darurat dan sebagai data dasar pendistribusian bantuan sandang pangan maupun bantuan lainnya yang diberikan sesuai kebutuhan korban.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sasaran strategis 4.1 ini secara berturut - turut dapat terealisasi 100 %, Data perbandingan capaian pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana dari tahun 2014 sd 2018 tersaji dibawah ini.

Tabel.3.11  
Data perbandingan capain pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana  
Tahun 2014 sd 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian					Target Sasaran (%)					Capaian (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=100	15=5/10*100	16=6/1*100	17=7/1*100	18=7/1*100
4	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana, BPBD sebagai leading sektor penanggulangan bencana berusaha mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait. Sumber pembiayaan yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Korban selama penanganan bencana akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah :

1. Dana Siap pakai dari BNPB
2. Dana Tak Terduga dari BPBD Provinsi NTB
3. Dana Tak Terduga dari Pemerintah Kota Bima
4. Dana APBD melalui DPA BPBD
5. Dana CSR dari Kelompok Dunia Usaha
6. Bantuan dari Daerah Lain
7. Dana Bantuan dari masyarakat secara individu.
8. Dana APBN melalui kementerian terkait
9. Dana lainnya yang tidak mengikat

Selama masa tanggap darurat berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama pada penanganan bencana besar seperti yang terjadi pada penanganan bencana banjir bandang di awal tahun 2017 yang lalu, Hambatan yang selalu terjadi adalah adanya tumpang tindih bantuan, karena kurang koordinasi antara pemberi bantuan dengan Posko Utama atau posko bantuan, biasanya terjadi karena pemberi bantuan langsung mendroping bantuan ke lokasi korban tanpa koordinasi dengan posko bantuan. atau kendala lain biasanya terjadi karena data/ informasi yang kurang detail tentang korban, jumlah keluarga, umur, pendidikan dan lain - lain. Data tersebut dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan, kendala lain yang sangat berarti pula adalah kurangnya personil yang kompeten untuk menangani korban yang sakit.

Terkait pendropingan air bersih terdapat kendala antara lain :

1. Keterbatasan dana APBD II
2. Keterbatasan mobil tangki untuk pendropingan air
3. Kurangnya tandon air untuk penampungan sementara
4. Belum adanya upaya - upaya jangka panjang dalam penanggulangan bencana kekeringan ,

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan kegiatan tersebut, antara lain :

1. Mengupayakan bantuan dari luar baik dari APBD I maupun BNPB dan Donor lainnya.
2. Membagi tugas dengan SKPD lain untuk memenuhi keterbatasan mobil tangki maupun personil
3. Menggunakan Dana Sisa Bencana banjir bandang yang bersumber dari Bantuan Masyarakat untuk pengadaan tandon dan mendapat bantuan tandon dari BPBD Provinsi NTB
4. Mengkoordinasikan dengan dinas Teknis terkait bersama TAPD untuk mengupayakan Menjadi program prioritas tahun 2019.

#### 4.2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana (S4.2)

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana bahwa Sarana dan prasarana umum meliputi:

- a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
- b. posko Bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;

- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *valbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, Pemerintah dari Swasta); dan lokasi sementara bagi pengungsi.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana menjadi salah satu indikator penting dalam menyukseskan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana, sehingga BPBD pada tahun 2018 ini menetapkan sasaran strategis 4.2 menjadi salah satu indikator penting untuk memperhitungkan kinerja organisasi.

Berdasarkan penggolongan sarana prasarana kebutuhan dasar dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut diatas maka secara umum sarana prasarana penunjang saat bencana dapat disederhanakan penggolongannya antara lain :

1. Keberadaan Gudang logistik beserta kelengkapannya
2. Jalur dan Tempat Evakuasi Sementara bagi korban (Tenda, Gedung, lapangan, dll)
3. Pusdalops dan Peralatan peringatan dini (Peta rawan bencana, dll)
4. Peralatan Evakuasi (pelampung, felbet, tali, genset dan lampu sorot, alat pengaman dll)
5. Alat angkut untuk evakuasi berupa Mobil, Perahu karet, motor trailer, truk sampah, dll
6. Peralatan dapur umum, Sarana air bersih dan sanitasi
7. Alat berat seperti, Eksavator amfibi, Loder, dll

pada masa tanggap darurat terjadi, pengerahan peralatan dapat dilakukan baik yang berada di Daerah maupun Luar daerah bahkan peralatan yang dimiliki pihak swasta dikerahkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

Pelaksanaan penanganan darurat baik siaga darurat, saat tanggap darurat maupun saat pemulihan selama tahun 2018 cukup bagus dalam pelaksanaannya, salah satu indikator pendukung penyelenggaraannya karena adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. berdasarkan hasil penilaian kebutuhan peralatan penanggulangan bencana peralatan yang masih kurang antara lain :

1. Gudang logistik masih kurang luas dan Rak barang masih terbatas
2. Jumlah eksavator amfibi masih sangat terbatas di Lingkungan Pulau Sumbawa, dan Kota Bima belum memiliki alat berat tersebut sebagai alat untuk membersihkan sampah yang tersangkut di jembatan yang sering menyebabkan luapan banjir.
3. Perangkat Pusdalops masih terbatas.
4. Perahu karet kondisi rusak kurang berfungsi sebagai sarana evakuasi bagi korban banjir

5. Keterbatasan tenaga terlatih yang mengelola logistik dan pergudangan.

Berdasarkan uraian di atas maka secara kuantitatif penilaian indikator sasaran strategis 4.2 ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3.12  
Penilaian Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dan Penanggulangan Bencana

No	Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan PB	Bobot	Ada/tidak ada		Kepemilikan		Kondisi		Kecukupan		Nilai
			Ada	Tidak ada	milik sendiri	Milik Daerah lain/Swasta	Baik	Kurang baik/Rusak	Cukup	Kurang	
1	Keberadaan Gudang logistik dan kelengkapannya	20	v		V		v			v	15
2	Jalur dan Tempat Evakuasi Sementara bagi korban	15	v		V		v		v		15
3	Pusdalops dan peralatan peringatan dini	15	v		V		v			v	10
4	Peralatan Evakuasi	5	v		V		v		v		5
5	Alat angkut untuk evakuasi berupa Mobil, Perahu karet, dll	15	v		V		v			V	10
6	Peralatan dapur umum, sarana air bersih dan sanitasi	10	v		V		v		v		10
7	Alat berat seperti, Eksavator ampibi, eksavator mini, dll	20	v				v			V	15
		100									80

Berdasarkan tabel di atas ada 7 kelompok atau jenis sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana, dari 7 kelompok tersebut memiliki bobot penilaian yang berbeda - beda menurut fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 7 kelompok tersebut merupakan kebutuhan sarana prasarana minimal yang harus ada untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan kedaruratan bencana. dari bobot total 100 %, Keberadaan sarana prasarana penunjang sampai dengan tahun 2018 sebesar 80 %, nilai tersebut diperoleh dari angka kumulatif dari penilai terhadap Keberadaan 7 kelompok

atau jenis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang (ada atau tidak ada, kepemilikannya, kondisi sarana dan kecukupannya)

Dari penjelasan tersebut di atas maka capaian terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjang sebesar 80 % atau sama dengan target kinerja Sasaran strategis 4.2 tahun 2018 sebesar 80 % atau angka ketercapaiannya sasaran strategi 4.2 ini sebesar 100 %.

Tabel.3.13

berikut dapat menggambarkan angka capaian sasaran strategis 4.2

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Satuan	% Realisasi	Capaian	Realisasi	%	
2	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana					80	%	80	%
		1 Pengadaan Sarana Prasarana penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	11	11	jenis	100				
		2 Penilaian Kebutuhan peralatan BPBD	80	80	%	100				

#### 5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 (S.5): Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain memiliki tugas pokok sebagai komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, tugas lain yang diemban adalah mengkoordinasikan tugas – tugas penanggulangan bencana dengan Instansi teknis salah satunya adalah mengkoordinasikan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana dengan SKPD teknis lainnya seperti Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan kelautan dan lain-lain. dan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal ke Provinsi maupun ke pusat serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan antara Jumlah paket sarana prasarana yang rusak dari Dokumen JITU Pasna tahun sebelumnya dengan jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca yang bisa ditangani oleh BPBD maupun dinas teknis lainnya, jika dilihat dari hasil

Untuk mengukur capaian kinerja pada Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana bisa ditangani adalah jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak akibat bencana dapat ditangani dibagi dengan bencan hasil analisa kerusakan pasca bencana dikali dengan 100 %. Tingkat capaiannya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.14  
Pencapaian Sasaran strategis S.5

NO	JUMLAH PAKET PERBAIKAN YANG DIKOORDINASIKAN BERDASARKAN DATA KERUSAKAN	JUMLAH PAKET YANG DITANGANI DINAS TEKNIS DAN BPBD	CAPAIA N %	Target Sasara n %	Ketercapaian n %
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	4081	325	7,96	100	7,96

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa Total jumlah paket rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 4081 paket yang tersebar di Kota Bima, yang bisa ditangani pada tahun 2018 baik oleh Dinas PU Pertamben maupun oleh BPBD Kota Bima adalah sebanyak 325 Paket yang tersebar di Kota Bima sehingga realisasi sasaran strategis 5 (S5) adalah sebesar 7,96 % dari target sasaran strategis tahun 2018 sebesar 100 %, maka angka ketercapaian sasaran strategis ini adalah 7,96 %.

Tabel. 3. 15  
Perbandingan Capaian S5 Tahun 2014 Sampai dengan 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja	CAPAIAN (%)					Target Sasaran (%)					Ketercapaian (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2108
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/9*100	15=5/10*100	16=6/11*100	17=7/12*100	18=7/13*100
	Terwujudnya pemulihannya sarana dan prasarana fisik dan non	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana	5	55	22	32	7,96	50	60	70	80	90	10,00	91,67	30,81	39,77	7,96





Sejak terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 tahun 2010, Peningkatan aktivitas kegiatan penanggulangan bencana baik Prabencana, saat bencana maupun pasca bencana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pagu anggaran DPA BPBD Kota Bima dari tahun 2010 hingga 2017 adalah rata – rata 87 % per tahun, dan peningkatan bantuan dana dari BPBD Provinsi NTB dan BNPB melalui dana Siap pakai untuk kegiatan tanggap darurat kekeringan di Kota Bima dan Dana rehabilitaasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, disamping itu terdapat peningkatan program dan kegiatan kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui BPBD dengan Organisasi donor seperti, Kerjasama dengan OXFAM Indonesia, JICA Jepang, Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Federasi TSBK, TSBK dan pendukung lainnya. Keberhasilan yang diuraikan di atas merupakan keberhasilan bersama atas manajemen organisasi yang cukup baik dari pimpinan BPBD Kota Bima dalam mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun peralatan yang masih terbatas.

**b. Perencanaan Organisasi yang sesuai dengan tuntutan paradigma Organisasi**

Selain unsur kepemimpinan, unsur perencanaan yang baik dalam organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keberhasilan organisasi, Dokumen Perencanaan yang strategis dan penilaian yang tepat ke depan akan memberikan dampak ketepatan dalam pengambilan arah kebijakan – kebijakan organisasi. Dokumen Perencanaan yang telah disusun BPBD Kota Bima adalah seperti Rencana Strategis Periode 2014-2018, Rencana kerja tahun 2017, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Kota Bima. Dokumen – dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bima baik sebagai fungsi Pelaksana penanggulangan bencana maupun sebagai fungsi koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan bencana di Kota Bima.

**c. Sumber daya manusia yang mumpuni**

Jumlah Pegawai BPBD Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 41 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BPBD didominasi oleh pegawai pada tingkat pendidikan Sarjana S1 sebesar 47,5%, kemudian Tenaga dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 40 % , sebanyak 10 % tenaga dengan pendidikan S2 sementara 2,5 dengan pendidikan D3 .

Berdasarkan penempatan pegawai pada jabatannya, Jabatan Struktural pada BPBD Kota Bima telah terisi penuh oleh aparatur yang mumpuni, sehingga cukup memberikan sumbangsih bagi keberhasilan BPBD sehingga tercapai indikator target yang telah ditetapkan sebelumnya.

**d. Penerapan teknologi yang memadai**

Penguasaan teknologi yang memadai akan berdampak besar terhadap penyelesaian pekerjaan – pekerjaan yang diemban. BPBD Kota Bima dalam menjalankan tugasnya telah menggunakan teknologi informasi yang cukup memadai seperti ketersediaan Wifi, peralatan komputerisasi yang memadai, Simda keuangan, penganggaran dan asset, teknologi jaringan informasi untuk menerima dan melaporkan kejadian dan potensi bencana melalui radio, termasuk melakukan pendataan profil kelurahan menggunakan HP Android kerjasama dengan OXFAM Indonesia. Kesemuanya itu menjadi faktor pendukung keberhasilan BPBD dalam mencapai indikator target pada tahun 2017.

**e. Dukungan donor dan Lembaga Kemitraan Lokal**

Proyek kerjasama membangun ketangguhan masyarakat melalui program pengurangan risiko bencana antara Pemerintah Kota Bima dalam hal ini BPBD Kota Bima dengan OXFAM Indonesia melalui LP2DER sangat mendukung keberhasilan program program peningkatan kapasitas baik kelembagaan BPBD maupun masyarakat. Program kerjasama ini membawa Pemerintah Kota Bima menjadi Nominasi Kota Tangguh bencana dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, sehingga beberapa kali Kepala Daerah beserta Kepala BPBD mengikuti pertemuan nasional bahkan Internasional di Negara Jepang, Thailand dan Bangkok terkait keberhasilan Kota Bima memulai proses pembentukan Kota Tangguh bencana. Selain dengan OXFAM, BPBD Kota Bima juga bekerjasama dengan JICA (Japan international Corporation Agency) dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang beberapa kali juga mengirim Pemerintah daerah untuk belajar langsung ke Negara tersebut termasuk kerjasama dengan Konsulat Amerika untuk pelatihan tenaga medis dan kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengirim pegawai BPBD mengikuti pelatihan Pemadam Kebakaran di Australia.

Dukungan lain juga adalah dari Lembaga Lokal LP2DER Bima, Forum PRB Mbojo Matenggo Kota Bima yang didalamnya memiliki unsur Perguruan tinggi, TSBK, HIPGABI dan Lembaga yang peduli terhadap penanggulangan lainnya. Lembaga tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumen – dokumen penanggulangan bencana

seperti : RPB, Peta Risiko Bencana, RBBK dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka menuju kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Faktor – Faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi.

**a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia**

Pada uraian tentang keberhasilan BPBD, Sumberdaya yang mumpuni cukup tersedia pada struktur organisasi BPBD, namun pada tugas - tugas khusus seperti pengelola gudang dan Operator Pusedalops belum memiliki tenaga yang bersertifikat keahlian untuk menyelesaikan tugas - tugas secara profesional.

**b. Masih kurangnya Koordinasi dengan sektoral**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain sebagai fungsi pelaksana penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi koordinasi. Sebagai organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dibidang penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder terkait mengingat pekerjaan penanggulangan bencana memerlukan kerjasama yang baik antara tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana untuk program rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.

**c. Fasilitas Sarana Prasarana Pendukung masih kurang memadai**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bencana,fasilitas sarana prasarana pendukung sangat diperlukan.Berdasarkan analisa kebutuhan sarana prasarana pendukung saat bencana, persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang saat bencana selama tahun 2017 sebesar 80%, ini berarti ketersediaannya cukup memadai, sarana prasarana yang masih kurang diantaranya adalah, Gudang Logistik yang kurang luas, Alat berat seperti eksavator amfibi, Perahu karet masih kurang, Sistem Peringatan Dini untuk semua bencana masih terbatas dll.

Solusi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk mengurangi ketidakberhasilan di atas adalah :

- a. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dan Upaya pemenuhan tenaga trampil dapat dilakukan denganmembentuk Tim Teknis penyusunan dokumen penanggulangan bencana yang anggotanya dari SKPD terkait seperti Bappeda, bagian Hukum Setda, Unsur Perguruan tinggi, Forum PRB Kota Bima, TSBK dan lembaga lainnya untuk secara bersama – sama menyusun dokumen – dokumen penanggulangan Bencana seperti : RPB, Analisa Risiko Bencana, dan dokumen penanggulangan bencana lainnya hingga menjadi legitimasi hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bima

- b. Melakukan upaya – upaya diplomasi dengan stakeholder lain melalui legitimasi hukum dalam rangka peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal penanggulangan bencana dengan diterbitkannya
- c. Melakukan sharing dana dengan donor, dengan mengupayakan pengalokasian anggaran bantuan dari donor pada program dan kegiatan yang tidak dialokasikan dari Anggaran BPBD Kota Bima, APBD Kota maupun dari APBN melalui BNPB.
- d. Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk bantuan Logistik bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan risiko bencana, sehingga pada tahun ini BPBD Kota Bima mendapat alokasi bantuan pembentukan kelurahan tangguh bencana 1 Kelurahan dari BPBD Provinsi untuk Kelurahan tangguh Pratama dan 2 Kelurahan untuk Pengembangan kelurahan tangguh dari BNPB sebanyak 1 Kelurahan serta bantuan Dana melalui program Mitigasi struktural rumah aman bencana.
- e. Untuk menambah wawasan bagi Aparatur pemadam kebakaran maupun Aparatur BPBD umumnya, upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim/ mengikutsertakan tenaga PMK dan Aparatur BPBD pada diklat - diklat teknis penanggulangan bencana.

#### 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana/anggaran, yaitu 1 (satu). Bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

Selama Tahun 2018, dari sejumlah 14 (empat belas) program dan 41 kegiatan strategis yang dilaksanakan sebesar 100 % telah dapat dilaksanakan dengan efisien.

#### 5. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018 sebanyak 14 program dan 41 Kegiatan. Pencapaian target program dan kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja utama BPBD. dari data tabel pengukuran kinerja organisasi rata - pencapaian dari 5 sasaran strategis

adalah sebesar 111,92 % sementara pencapaian sasaran kinerja dari target rencana strategis 5 tahun sebesar 89,84 %. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan BPBD Kota Bima tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran LAKIP ini.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan dana yang besar memberikan pengaruh yang cukup besar pula untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berhasil dengan baik, maka secara berkesinambungan dapat menunjang tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) BPBD Kota Bima tahun 2018. Anggaran yang tersedia untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018 ini adalah sebesar Rp. 58.127.892.359,87 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 1.924.244.199,87 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 56.203.648.160,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 2.025.945.000,- Belanja barang dan jasa Rp. 12.147.933.160,- dan belanja modal sebesar Rp. 42.029.770.000,-

Realisasi belanja tahun 2018 adalah Rp 30.511.200.413,36,- atau sebesar 52,49 % dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.885.198.157,- atau 97,97 % dan belanja langsung sebesar Rp. 28.626.002.256,36 atau 50,93 %. Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPBD Kota Bima tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3. 16

Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Bima tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Terserap (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	1.924.244.199,87	1.885.198.157,00	1.885.198.157,00	97,97
	a. Belanja Pegawai	1.924.244.199,87	1.885.198.157,00	1.885.198.157,00	
2.	Belanja Langsung	56.203.648.160,00	28.626.002.256,36	28.626.002.256,36	50,93
	a. Belanja Pegawai	2.025.945.000,00	1.981.391.000,00	1.981.391.000,00	
	b. Belanja Barang dan jasa	12.147.933.160,00	8.160.764.101,00	8.160.764.101,00	
	c. Belanja Modal	42.029.770.000,00	18.483.847.155,36	18.483.847.155,36	
	<b>Jumlah</b>	<b>58.127.892.359,87</b>	<b>30.511.200.413,36</b>	<b>30.511.200.413,36</b>	<b>52,49</b>

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

Namun demikian, akibat adanya kegiatan yang tidak efisien sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat pula penggunaan dana yang tidak efisien sebesar Rp. 0 (%).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yaitu tidak terdapat penggunaan dana yang merugikan keuangan negara.

Analisis pencapaian kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencapai 52,49 % hal ini berarti tingkat pencapaian Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima kurang memuaskan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2018 pada lampiran.

Karena kendala belum tersedianya lahan untuk kegiatan relokasi, sementara tanah yang ada yang sedianya diperuntukan sebagai lahan relokasi belum bisa digunakan karena perlu dilakukan pematangan, sehingga tidak bisa memproses kegiatan relokasi dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Dari sejumlah paket pengadaan yang direncanakan baru sebagian paket yang sudah berjalan, diantaranya rekonstruksi jembatan padolo II yang sudah terealisasi sebesar 90 % dan rekonstruksi jembatan gantung sebesar 60 %, sedangkan paket pengadaan yang lain sampai akhir tahun 2018 belum bisa direalisasikan seperti pengadaan sarana prasarana perumahan, sanitasi dan PJU Perumahan. Hal inilah yang menyebabkan realisasi keuangan BPBD Kota Bima kurang memuaskan karena memang anggaran dari dana hibah cukup besar sehingga mempengaruhi realisasi BPBD Kota Bima. Kalau dilihat dari dana APBD II secara keseluruhan sudah terealisasi hampir 100 % baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Sehingga total realisasi anggaran jika digabungkan realisasi dari dana hibah dan dana APBD II sangat kecil yaitu sebesar 52,49 %.

Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17

## Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

No	Urusan yang dilaksanakan		Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan
1	Urusan Wajib otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Dearah, Kepegawaian	I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>924.591.900</b>	<b>908.106.810</b>
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	133.092.000	133.092.000
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61.885.303	60.913.845
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.023.400	16.819.000
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.080.000	88.080.000
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.035.000	26.034.000
		6	Penyediaan alat tulis kantor	44.299.500	44.297.000
		7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.202.000	38.182.000
		8	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.873.000	12.851.300
		9	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.298.000	5.298.000
		10	Penyediaan makanan dan minuman	55.200.000	55.190.000
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	397.603.697	397.593.765
		12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.000.000	29.755.000
		II	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>339.972.000</b>	<b>339.947.675</b>
		1	Pembangunan gedung kantor	52.130.000	52.130.000
		2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.650.000	27.650.000
		3	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.250.000	38.250.000
		4	Pengadaan mebelair	25.920.000	25.920.000
		5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.650.000	31.650.000
		6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	141.872.000	141.847.675
		7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.500.000	22.500.000
		III	<b>Program peningkatan kedisiplinan aparatur</b>	<b>46.792.500</b>	<b>46.792.500</b>
		1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	46.792.500	46.972.500
		IV	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>123.200.000</b>	<b>123.200.000</b>
		1	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.840.000	7.840.000
		2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	14.680.000	14.680.000
		3	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	52.300.000	52.300.000
		4	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	48.380.000	48.380.000
		V	<b>Program penataan paraturan perundang-undangan</b>	<b>42.385.000</b>	<b>42.385.000</b>
		1	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	42.385.000	42.385.000
		VI	<b>Program penyuluhan dan penanggulangan bencana</b>	<b>828.489.700</b>	<b>795.283.490</b>
		1	Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait;	20.850.000	20.850.000



2	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)	71.527.100	71.527.100
3	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, TAGANA, TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	0	0
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	736.112.600	702.906.390
<b>VII</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana</b>	<b>369.484.000</b>	<b>369.439.000</b>
1	Mitigasi Bencana	369.484.000	369.439.000
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.950.000</b>
1	Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	8.000.000	7.950.000
<b>IX</b>	<b>Program pengkajian secara cepat dan tepat</b>	<b>82.035.000</b>	<b>81.730.000</b>
1	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	70.785.000	70.480.000
2	Analisa kerusakan sarana dan prasarana	11.250.000	11.250.000
<b>X</b>	<b>Program pemenuhan kebutuhan dasar</b>	<b>177.490.000</b>	<b>168.171.662</b>
1	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	123.740.000	114.426.662
2	Pemenuhan sandang dan pangan	53.750.000	53.745.000
<b>XI</b>	<b>Program Rehabilitasi</b>	<b>89.910.000</b>	<b>89.910.000</b>
1	Monitoring dan evaluasi	89.910.000	89.910.000
<b>XII</b>	<b>Program Rekonstruksi</b>	<b>51.807.011.160</b>	<b>24.302.179.719</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	110.775.000	110.680.700
2	Pembangunan sarana dan prasarana	1.924.556.160	1.907.178.867
3	Pmbangunan Rumah Masyarakat	49.771.680.000	22.284.320.152,36
<b>XIII</b>	<b>Program Kesiapsiagaan</b>	<b>669.222.200</b>	<b>663.372.200</b>
1	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat	73.248.100	73.248.100
2	Pembentukan Kelurahan Tangguh	595.974.100	590.124.100
<b>XIV</b>	<b>Program Peringatan dini</b>	<b>524.524.700</b>	<b>518.924.700</b>
1	Mengamati gejala bencana	372.720.600	367.120.600
2	Menyebarkan informasi potensi bencana	151.804.100	151.804.100
<b>XV</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pergudangan dan Logistik</b>	<b>170.540.000</b>	<b>168.610.000</b>
	Manajemen Logistik dan Pergudangan	170.540.000	168.610.000
<b>JUMLAH</b>		<b>56.203.648.160</b>	<b>28.626.002.256,36</b>

Selama Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mendapatkan anggaran dari BNPB Pusat melalui program Sungai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18  
Program Bantuan Kerjasama dengan BNPB

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket
1.	Kegiatan Sekolah Sungai	Rp. 276.740.000	Rp. 272.392.250	

C. Capaian Kinerja Eselon III dan IV

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima diukur dari Penetapan Kinerja Eselon III dan IV dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 19

## Capaian Kinerja Eselon III dan IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

NO	KEPALA DINAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA INDIKATOR	TARGET	ESELON III	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	TARGET	ESELON IV	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET
1	ESELON II	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Persentase Kelurahan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh yang dibina/Jumlah Kelurahan x 100	100%	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Kesiapsiagaan	Meningkatnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana	Persentase ketersediaan sistem kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana	Jumlah sistem kesiapsiagaan yang ada dibagi jumlah sistem kesiapsiagaan yang harus ada (SOP, Relawan, Dok Renaksi) x100%	80%	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Tersedianya mekanisme kedaruratan yang teruji dan SDM terlatih	Jumlah SDM terlatih dan mekanisme kedaruratan yang teruji	Jumlah SDM terlatih	110 Orang 1 kali

												Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan tangguh bencana	Terbentuknya Kelurahan tangguh bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	5 Kelurahan
						Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<b>Program Penanggulangan Bencana /Pecegahan bencana</b>	Tersedianya sarana prasarana mitigasi bencana	Jumlah sarana prasarana	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	4 Paket	Kasi Pencegahan	Mitigasi Bencana	Tersedianya Sarana dan prasarana mitigasi bencana	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	50 titik Sumur resapan 5 bh panel air hujan

						<b>Program Peringatan Dini</b>	Meningkatnya peringatan dini bencana	Persentase ketersediaan sistem peringatan Dini bencana	Jumlah sistem peringatan dini yang ada dibagi jumlah sistem peringatan dini yang harus ada (Data Analisis, Media Penyebaran informasi, Jalur Evakuasi, AWS/AWLR)x100%	80%	Kepala Seksi Pencegahan	Mengamati Gejala Bencana	Tersedianya data pengamatan bencana	Jumlah data hasil pengamatan	Jumlah dokumen	1 dokumen dan 1 sistem peringatan dini banjir
											Kepala Seksi Pencegahan	Menyebarluaskan informasi potensi bencana	Tersebarluasnya informasi potensi bencana	Jumlah jenis penyebaran informasi	Jumlah jenis penyebaran informasi	8 Jenis

		Meningkatnya Kapasitas aparatur dan Tim Penanggulangan bencana	Jumlah SDM terlatih	Jumlah SDM yang dilatih	180 Orang	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<b>Program Penyuluhan dan Penanggulangan bencana</b>	Meningkatnya pengetahuan penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih	Jumlah SDM yang dilatih	180 Orang	Seksi Pencegahan	Diklat Penyuluhan kepada anggota Masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)	Terlatihnya masyarakat pendidika n terkait bencana	Jumlah personil pada Cifitas Pendidikan terlatih	Jumlah personil pada Cifitas Pendidikan terlatih	360 Orang
1												Seksi Pencegahan	Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, Tagana, Tim Sar, dll)	Terlatihnya Tim Penanggulangan bencana dalam upaya Penanganan Kedaruratan Bencana	Jumlah Tim Penanggulangan bencana terlatih	Jumlah Tim Penanggulangan bencana terlatih	70 Orang
												Seksi Pencegahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan	Terkapasitasnya Lembaga Penanggulangan Bencana	Jumlah Lembaga dan Personilnya terlatih	Jumlah Lembaga dan Personilnya yang dilatih	4 Kelompok dan 100 personil terlatih

												Bencana				
					Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	<b>Program Penyuluhan dan Penanggulangan bencana</b>	Meningkatnya pengetahuan penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih	Jumlah SDM yang dilatih	180 Orang	Seksi Rehabilitasi	Diklat Penyuluhan kepada SKPD terkait	Terlatihnya SKPD terkait bencana dalam Hal Perhitungan Kerugian Pasca bencana	Jumlah Personil SKPD terkait terlatih	Jumlah Personil SKPD terkait terlatih	40 Orang
	Tersedianya Pedoman dalam Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia menjadi Pedoman PB	Jumlah Dokumen Penanggulangan bencana yang dibuat	1 Dokumen	Sekretaris BPBD	<b>Program Penataan peraturan Perundangan</b>	terbitnya Peraturan perundang-undangan daerah secara baik	Jumlah aturan Daerah	Jumlah aturan Daerah yang diterbitkan	1 Dok	Kasubag Program dan Pelaporan	Penyusunan dan Penerbitan Produk hukum Daerah	Tersedianya dokumen dan Legalisasi Hukum terhadap Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen yang disusun dan dilegalisasi	Jumlah Dokumen yang disusun dan dilegalisasi	1 Dokumen Renkon

	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara Cepat dan Tepat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Bencana	Jumlah Korban bencana yang bisa dipenuhi kebutuhan dasarnya/Jumlah Korban bencana x 100	100%	Kabid Kedaruratan dan Logistik	<b>Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar</b>	Terpenuhinya Kebutuhan dasar	Jumlah Kebutuhan dasar	Jumlah Kebutuhan Dasar	3 jenis	Kasi Logistik	Pemenuhan Kebutuhan air bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air bersih dan Sanitasi saat bencana	Jumlah air bersih dan Sanitasi	Jumlah air bersih dan Sanitasi	14 Titik
											Kasi Logistik	Pemenuhan Sandang dan Pangan	Tersedianya Sandang dan pangan saat bencana	Jumlah Sandang dan pangan	Jumlah Sandang dan pangan	4 Jenis
						Program peningkatan pengelolaan Pergudangan dan logistik	Tersedianya data logistik dan peningkatan pelayanan pergudangan	Jumlah Laporan dan layanan pergudangan	Jumlah Laporan dan layanan pergudangan	4 Triwulan	Kasi Logistik	Manajemen Logistik dan pergudangan	Tersedianya Data Logistik dan Pergudangan	Jumlah Laporan Logistik dan pergudangan	Jumlah Laporan Logistik dan pergudangan	4 Triwulan





		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana	80%	Kabid Kedaruratan dan Logistik	<b>Program Pengkajian secara cepat dan tepat</b>	Tersedianya Dokumen secara cepat untuk bahan pengambilan kebijakan secara tepat	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	Kasi Kedaruratan	Analisa cakupan lokasi dan Jumlah Korban	Tersedianya data Lokasi dan Jumlah Korban bencana	Jumlah Data	Jumlah Dokumen	1 Data Lokasi dan Jumlah Korban
					Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<b>Program Pengkajian secara cepat dan tepat</b>	Tersedianya Dokumen secara cepat untuk bahan pengambilan kebijakan secara tepat	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	Kasi Rehabilitasi	Analisa Kerusakan sarana dan prasarana	Tersedianya Dokumen DALA	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen

						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana</b>	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana prasarana PB yang ada dibagi jumlah sarana dan prasarana PB yang harus ada x 100%	80%	Kasi Kedaruratan	Pengadaan sarana prasarana penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	2 jenis
	Terwujudnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana	Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan fisik pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang bisa ditangani/jumlah sarana dan prasarana yang terdampak bencana x 100			Program Rehabilitasi	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana fisik dan fisik pasca bencana yang direhabilitasi	Prosentase rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang direhabilitasi dibagi jumlah sarana prasarana yang rusak pasca	80%	Kasi Rehabilitasi	Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Monev	Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 Dokumen

								bencana x 100%								
						Program Rekonstruksi	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana fisik dan fisik pasca bencana yang direkonstruksi	Prosentase Rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang direkonstruksi dibagi jumlah sarana prasarana yang rusak pasca bencana x 100%	80%	Kasi Rekonstruksi	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	Terkoordinasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	1200 unit rumah relokasi, Insitu 379 Unit RRB dan 431 Unit RRS, 1 Paket PSU Perumahan dan 2 paket rekonstruksi infrastruktur

											Kasi Rekonstruksi	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana umum	Jumlah sarana dan prasarana umum	Jumlah sarana dan prasarana umum	2 Paket
												Pembangunan Rumah masyarakat	Tersedianya prasarana perumahan bagi korban pasca bencana	Jumlah Paket KM dan PSU	Jumlah Paket KM dan PSU	2 Paket KM, 4 Paket PSU
					Sekretaris BPBD	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa kantor dibagi jumlah kebutuhan jasa kantor X100%	80%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	12 Bulan
											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	12 Bulan



											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	12 Bulan
											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	12 bulan
											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Jenis/komponen





													dilakukan	dilakukan		
											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang bisa dilakukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang bisa dilakukan	12 bulan
						<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur yang ada dibagi jumlah sarana prasarana aparatur yang	80%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 Paket perlengkapan halamn kantor



																eselon III , 5 uni kursi staf t
																Pemeliharaan gedung 1 tahun (kerusakan ringan)
																4 Mobil dan 9 Motor

											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedanya paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lap Top, ac, tenda, komputer, HT, printer
						<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	Meningkatnya disiplin aparatur	Porsentsase ketersediaan pakaian kerja	Jumlah dan jenis pakaian kerja yang ada dibagi jumlah dan jenis pakaian kerja yang harus ada x 100%	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu	Junlah pakaian khusus hari - hari tertentu	Junlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang tersedia	41 Set
											Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyusunan data pegawai (Duk,	Tersedianya data pegawai	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	3 Dokumen

											Berkala, SKP)					
						<b>Progra m Peningk atan Pengem bangan sistem pelapor an capaian kinerja dan keuanga n</b>	berkemb angnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase berkemb angnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokume n yang ada dibagi jumlah dokume n yang harus ada x 100%	100%	Kasubag Keuanga n	Penyus unan pelapor an keuang an semest eran	Tersedian ya laporan keuangan semester an	Jumlah Dokume n laporan keuanga n semeste ran	Jumlah Doku men lapora n keuan gan semes teran	2 Dokume n
										Kasubag Keuanga n	Penyus unan pelapor an keuang an akhir tahun	Tersedian ya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokume n laporan keuanga n akhir tahun	Jumlah Doku men lapora n keuan gan akhir tahun	3 Dokume n	





Berbagai Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja eselon III dan IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 sebagai berikut :

- Program Kesiapsiagaan

Adapun Sasaran dari Program Kesiapsiagaan adalah meningkatnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Program tersebut dilaksanakan dengan beberapa kegiatan salah satu diantaranya adalah Gladi tentang mekanisme tanggap darurat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sub bidang kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut mempunyai sasaran yaitu tersedianya mekanisme kedaruratan yang teruji dan SDM terlatih. Adapun target dari SDM yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 110 orang, sedangkan realisasinya sebanyak 110 orang. Berarti pencapaian dari kegiatan tersebut sebesar 100 %. Kegiatan ini dilakukan melalui simulasi, pelatihan maupun sosialisasi baik melalui sanduk maupun kegiatan – kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai elemen seperti Relawan dari tiap kelurahan, TNI, POLRI, SAR, TIM KESEHATAN, PMI dan civitas akademi.







Selain kegiatan Gladi Tentang mekanisme tanggap darurat, di Program kesiapsiagaan juga terdapat kegiatan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Kegiatan ini merupakan kegiatan sub bidang kesiapsiagaan. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sadar akan kekurangannya untuk merespon setiap kejadian yang ada dilapangan maka dibentuklah Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) yang bertujuan sebagai perpanjangan tangan dari BPBD untuk mencegah atau mengatasi bencana yang ada di tiap kelurahan sehingga dapat merespon dengan

cepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pada Tahun 2018 ini jumlah kelurahan yang dibentuk sebanyak 5 Kelurahan dari target yang ditentukan sebanyak 5 Kelurahan berarti realisasi kegiatan sebesar 100 %



- Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana

Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana mempunyai sasaran yaitu tersedianya sarana prasarana mitigasi bencana. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko **bencana**, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman **bencana**. Kegiatan mitigasi bencana merupakan kegiatan sub bidang pencegahan. Adapun target di Tahun 2018 dari kegiatan ini adalah pembangunan 50 titik sumur resapan dan 5 buah panel air hujan. Maksud dari kegiatan ini adalah meminimalisir genangan air hujan di atas tanah yang dapat menimbulkan banjir.





- Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana mempunyai sasaran yaitu untuk meningkatkan pengetahuan penanggulangan bencana dalam hal ini jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih. Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Diklat Penyuluhan Kepada Anggota Masyarakat

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari sub bidang pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan penanggulangan bencana sehingga terbentuk masyarakat yang terlatih dan terdidikterkait bencana. Adapaun jumlah personil yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 360 orang dari target sebanyak 360 orang. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembentukan sekolah aman bencana.





## 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan bidang kesiapsiagaan sub bidang pencegahan. Kegiatan ini bertujuan untuk terkapasitasnya lembaga penanggulangan bencana yang outputnya menghasilkan jumlah lembaga dan personil yang terlatih. Adapun target dari kegiatan ini adalah terbentuknya 4 kelompok dan 100 personil terlatih. Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi antara SKPD terkait dengan lembaga – lembaga civitas akademik. Salah satu contoh dari kegiatan ini adalah melalui rapat koordinasi perubahan iklim.





### 3. Kegiatan Diklat Penyuluhan Kepada SKPD terkait

Kegiatan Diklat Penyuluhan Kepada SKPD terkait merupakan program kegiatan dari bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sub bidang Rehabilitasi. Kegiatan ini menciptakan SKPD yang terlatih dalam hal perhitungan kerugian pasca bencana. Adapun target dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan tenaga terlatih sebanyak 40 orang. Tim yang terdapat dari kegiatan tersebut merupakan gabungan dari SKPD terkait yang diutus untuk mempelajari cara menghitung jumlah kerugian pasca bencana.





- Program Rehabilitasi merupakan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang rehabilitasi. Adapun Kegiatannya adalah Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini mempunyai sasaran yaitu menghasilkan jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi, sedangkan indikatornya berupa persentase rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana. Adapun target yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah tersedianya data monitoring dan evaluasi yaitu sebanyak 1 dokumen. Beberapa contoh kegiatan monev bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2017  
PEMBANGUNAN JEMBRAN PADOLO II  
KELURAHAN DARA**







## **Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Kota Bima untuk Keperluan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017**

### **a. Di Kelurahan Sambinae**

Berdasarkan tinjauan lapangan, diketahui bahwa lokasi/lahan yang akan digunakan adalah So Ndano Wau di Kelurahan Sambinae yang memiliki Luas  $\pm 4,3$  Ha, untuk keperluan pekerjaan Relokasi dan Prasana dan Sarana Umum, dimana lokasi lahan berada di Kompleks perumahan, markas Bromob dan cekungan sungai.





**b. Kelurahan Jatibaru**

Adapun pencapaian pada lokasi ini dengan satu jalan, merupakan jalan sekunder. Dimana Relokasi dilahan So Ndano Wawo ini akan dibangun perumahan pemukiman baru dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari pemukiman sekitar, dan lahan So Ndano Wawo berbatasan langsung dengan tebing kebun dan anak sungai.





**Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kelurahan Lampe, Kodo, Nungga dan Kelurahan Dodu Kota Bima.**

**a. Di Kelurahan Lampe.**

Berdasarkan tinjauan lapangan, bahwa pada saat tim survey BPBD melakukan peninjauan Dam Kapao, dimana Dam Kapao berada di Koordinat  $08^{\circ}30'42.65''S$  -  $118^{\circ}48'47,36T$  di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanæ Timur.



Kondisi fisik pekerjaan pada saat dilakukan monitoring dalam kondisi baik. Dengan keadaan Tanggul pondasi dan jembatan masih baik.



**b. Di Kelurahan Kodo.**

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa pada saat tim survey BPBD melakukan Monitoring di Dam Dadi Mboda Kelurahan Kodoberada dititik koordinat  $08^{\circ}30'33.69''S$  -  $118^{\circ}47'39,53T$ .



Kondisi pekerjaan pada saat dilakukan monitoring dalam kondisi baik, dengan berakhir pelaksanaan pekerjaan bulan Desember Tahun 2017 dan foto di atas diambil bulan November Tahun 2018.



**c. Di Kelurahan Dodu**

**- Dam Sipi Oi Lubu**

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa pada saat tim survey BPBD melakukan Monitoring di Dam Sipi Oi Lubu Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur berada dititik koordinat  $08^{\circ}29'24.69''S$  -  $118^{\circ}48'33,11T$ .



Dimana kondisi Dam Sipi Oi Lubu setelah pelaksanaan masih terlihat baik baik struktur sapa dinding maupun pintu-pntu air.

- **Dam Bangga Bulu**

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa pada saat tim survey BPBD melakukan Monitoring di Dam Sipi Oi Lubu Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timurberada dititik koordinat 08°29'45.49"S - 118°49'14,91



Dimana kondisi Dam Bangga Bolu setelah palaksanaan masih terlihat baik baik struktur sapa dinding maupun pintu-pntu air.

**d. Di Kelurahan Nungga**

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa pada saat tim survey BPBD melakukan Monitoring di Dam Toloweri Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timurberada dititik koordinat 08°28'28.55"S - 118°48'23,09T



Keadaan fisik Dam Toloweri Kelurahan Nungga berdasarkan monitoring, masih terlihat baik dan tidak ada masalah yang dihadapi terkait luapan air Dam. Adapun kelebihan setelah

pelaksanaan Dam, area Dam Toloweri ini sudah dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat Kota Bima, karna letak dan topografinya yang indah.



- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai kegiatan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar atau pendropingan air bersih yang merupakan kegiatan sub bidang logistik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang berada di wilayah terdampak kekeringan sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat tercapai. Adapun kegiatan pendropingan air bersih dapat di lihat pada gambar di bawah ini :





- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima di Tahun 2018 mendapatkan bantuan dana dari BNPB untuk kegiatan Sekolah sungai. Kegiatan ini masuk di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sub Bidang Pencegahan. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai. Bahwa sungai bukan dijadikan tempat untuk membuang sampah, tempat untuk tinggal sekalipun tempat untuk cuci, minum dan mandi. Karena kalau sungai sudah dikotori atau dijadikan tempat tinggal bukan tidak mungkin sungai akan kotor dan dapat menimbulkan penyakit yang menggunakannya bahkan dapat menimbulkan banjir. Kegiatan sekolah sungai dilakukan di sepanjang bantaran sungai padolo yaitu di Kelurahan Dara dan Paruga. Kegiatan Sekolah sungai dapat dilihat pada gambar di bawah ini :







## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (performance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu bertemu (Cushway, 1994).

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja. Tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melaksanakan 5 target pencapaian kinerja sasaran mewujudkan ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana melalui 6 indikator utama untuk mencapai Visi dan Misi organisasi dengan rata – rata pencapaian 111,92 %;
2. Realisasi Renstra BPBD Kota Bima periode tahun 2014 – 2018 sampai dengan tahun 2018 adalah rata – rata sebesar 89,84 % dari target sampai akhir tahun 2018. Hasil pencapaian realisasi dari target renstra ini sangat luar biasa, sehingga ke depan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan realisasi beberapa target indicator organisasi yang belum memperlihatkan hasil di tahun 2018 ini, seperti tingkat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Sedangkan kinerja keuangan dapat dicapai sebesar 52,49 % dari rata – rata capaian belanja langsung dan belanja tidak langsung SKPD.

### B. SARAN

1. Lakip ini diharapkan dapat menjadi gambaran keberhasilan/kegagalan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018, sehingga menjadi bahan pelajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya.
2. Kerjasama dari semua komponen baik internal BPBD, maupun instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi menjadi salah satu faktor keberhasilan BPBD dalam melaksanakan semua program yang telah ditetapkan.

Bima, Pebruari 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA

